

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pergerakan dinamis dalam arena politik global menghadirkan ragam dinamika baru yang mengharuskan setiap negara dapat beradaptasi dalam mempertahankan eksistensi dan keamanan nasionalnya. Berangkat dari ragam pertimbangan agenda domestik, menjadi aspek yang menunjang perumusan arah kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>1</sup> Pasca berakhirnya era Perang Dingin kondisi kekuatan dunia berpusat kepada hegemoni Amerika Serikat Serikat yang mempengaruhi aturan tatanan global. Unipolaritas saat itu berjalan dalam periode singkat, setelahnya mulai terbentuk kondisi lingkungan politik yang multipolar.<sup>2</sup>

Multipolaritas menandai peluang kebangkitan negara-negara baru untuk dapat menyeimbangkan kekuatannya, serta mengurangi ketergantungan dan pengaruh akan kekuatan negara-negara besar dalam mempengaruhi dinamika kebijakan sesuai dengan kehendak politik masing-masing, salah satunya terjadi kepada negara Turki hari ini. Mengamati Turki di bawah kendali kepemimpinan Erdogan yang sudah berjalan lebih dari dua dekade. Dalam pengamatannya, Turki menunjukan sikap yang mencoba untuk menghadirkan haluan baru yang anti-Barat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wicaksana, I Gusti Ngurah. "A Guide to Theory": Epistemologi Politik Luar Negeri. *Global dan Strategis* 1, no. 1 (2007): 12-19.

<sup>2</sup> Kubicek, Paul. "Contrasting Theoretical Approaches to Turkish Foreign Policy." *Turkish Studies* 23, no. 5 (2022): 645-658.

<sup>3</sup> Shamma, Michael. "Between East & West: Drivers Behind Turkish Foreign Policy in a Multipolar World." Available at SSRN 3475157 (2019).

Berbeda dengan cita-cita sang pendiri republik awal Turki yaitu Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk menjadikan Barat sebagai kiblat dan fondasi sekularisasi negara itu. Tetapi Turki hari ini dibentuk kepada suatu orientasi baru menggabungkan re-islamisasi dan wacana nasionalis yang mencerminkan ambisi politik para pemimpin menuju sentralisasi peran Turki di kawasan terutama negara-negara bekas jejak kejayaan Ottoman di masa lalu.<sup>4</sup>

Dibawah kekuasaan AKP secara bertahap semakin mencerminkan orientasi islam. Pembahasan ini menekankan kepada kebangkitan Turki dalam paruh kedua periode kepemimpinan Erdogan tahun 2018-2023. Sebab, pada tahun-tahun awal AKP masih menaruh fokus pada kebijakan luar negeri pro-Uni Eropa melalui lambang unsur demokratisasi. Namun, perkembangan proses membawa Turki kepada penyesuaian wacana nasionalis selain pandangan dunai pan-islamnya.

Hal paling menonjol ialah AKP berani untuk tak lagi mengadopsi Ataturk sebagai simbol persatuan bangsa, alih-alih peningkatan kekuasaan sesuai dengan konsep dan ambisi politik para politisi didalamnya untuk membentuk Turki yang berani dan independen. Rezim lama yang kental dengan paham Kemalis dikritik akibat sikap pasif untuk menstrategiskan posisi Turki di kancah internasional. AKP menghadirkan kebijakan luar negeri yang baru dengan mulai berdamai, kembali membangkitkan rasa bangga atas kejayaan Ottoman di masa lalu, turut serta menstrategiskan potensi geografisnya.

---

<sup>4</sup> Shammass, Michael. Between East & West: Drivers Behind Turkish Foreign Policy in a Multipolar World. October 25, 2019. SSRN. Accessed [16 May 2023]. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3475157>.

Dapat dikatakan bahwa letak geografis menjadi keunggulan tersendiri bagi Turki. Geografis menjadi aspek yang membawa ragam pertimbangan menarik baik dari segi politik maupun ekonomi untuk Turki dapat memainkan peranannya dan menunjukkan eksistensi lebih jauh mempengaruhi dan berkontribusi dalam mencapai perdamaian dunia. Meski begitu, unsur multilateralisme dalam kebijakan luar negeri era Kemalîs salah satunya yang menjadi objek pembahasan penulisan ini yakni terkait status keanggotaan Turki dalam aliansi North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang telah berlangsung sejak 1952.

Pembentukan orientasi politik baru ini tidak berarti menghapus peninggalan paham kemalîs sepenuhnya. Salah satunya terkait unsur multilateralisme yakni ketergabungan Turki dalam pakta pertahanan sekutu Barat yakni *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Anarkisme dalam tatanan global mengatakan bahwa tidak ada kekuatan atau otoritas apapun diatas negara. Bergulirnya waktu telah mendinamisasikan pemahaman tersebut untuk tidak lagi menyangkal pembentukan Aliansi sebagai cara baru dalam mencapai kepentingan negara-negara.

Orientasi geopolitik menggeser paham Kemalîs yang menjadikan barat sebagai kiblat sekularisme pendirian Republik Turki. Unsur demokratisasi serta jalinan pasar ekonomi yang menjanjikan menjadi aspek strategis dalam memodernisasi negara itu. Melihat kepada keunggulan geostrategis Turki yang berada di persimpangan tiga benua memberikan potensi besar untuk membawa negara itu mampu memainkan peran strategis dalam lintas negara.

Turki hari ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan luar negeri yang kian hari semakin terasa nyata. Pemerintahan saat ini berupaya menghadirkan ruang terhadap identitas lain seperti islamis, Turkish, eurasianism, dan neo-ottoman.<sup>5</sup> Pergerakan agresif menandai kebangkitan Turki untuk tujuan sentralisasi perannya sebagai kebangkitan kekuatan menengah di regional dan global. Nahkoda kepemimpinan Erdogan membuat negara itu tak lagi pasif memainkan perannya sebagai pemain global pasca periode perang dingin. Sebaliknya, berupaya untuk dapat menyesuaikan kekuatan dalam multipolaritas lingkungan global saat ini.

Selaras dengan tujuan Turki bergabung di NATO yakni atas dasar kepentingan keamanan dan pertahanan negaranya untuk berlindung dari ancaman musuh, yang pada saat itu Uni Soviet. Dalam keanggotaannya, Turki dianggap sebagai mitra strategis Aliansi dengan melirik kepada kepemilikan kekuatan material negara mengacu kepada lokasi strategis hingga pasukan tentara terbesar kedua di NATO. Namun, lingkungan multipolar disertai ambisi kuat sang pemimpin Turki hari ini menunjukkan keinginan membawa negaranya menjadi lebih kuat dan independen.

Bentuk nyatanya dilihat melalui kebijakan politik luar negeri nya yang berusaha untuk mengurangi pengaruh Barat. Selain itu, melihat kepada pemulihan hubungan Turki dengan Rusia yang semakin meningkat dalam kemitraan strategis menimbulkan pertanyaan terkait komitmen Turki dalam status keanggotaannya di

---

<sup>5</sup> Kubicek, P. (2022). Contrasting theoretical approaches to Turkish foreign policy. *Turkish Studies*, 23(5), 645-658.

NATO.<sup>6</sup> Melihat dari konsepsi keamanan kolektif jika suatu negara bersedia beraliansi tentu perlu memperhatikan komitmen yang didasari kepada prinsip dan nilai kolektivitas.

Namun yang terjadi pada Turki hari ini cukup memberikan ketegangan internal dan menimbulkan ketidaksepahaman dengan para sekutu lainnya di NATO. Secara tidak langsung multipolarisasi saat ini mengalami ketegangan distribusi kekuatan antara kemunduran kubu demokratis menghadapi kebangkitan kubu otokratis. Turki sebagai kekuatan menengah berjuang untuk memanfaatkan peluang untuk membentuk status baru sebagai kekuatan yang sedang 'naik' atau 'muncul'.<sup>7</sup>

Tak heran Turki kerap mengambil kebijakan kontroversial sebagai bagian dari implikasi refleksi politik luar negerinya untuk menjadi lebih tegas mengedepankan kepentingan mendesak negaranya. Demikian menunjukkan kebangkitan Turki saat ini berusaha untuk menyeimbangkan perannya di panggung politik global, disiasati dalam perspektif neorealisme memahami bahwa Turki sedang menjelajahi tantangan serta peluang politik global yang mengarah kepada dimulainya Perang Dingin baru di abad ke 21 ini.

Pergeseran Ankara yang sangat terlihat dapat dikatakan juga memberi sinyal menuju bentuk kekuasaan otoritarianisme mempersulit perwakilan NATO untuk mempertahankan narasi yang digambarkan aliansi sebagai ekspresi institusional dari komunitas keamanan yang didefinisikan di sekitar liberal-norma

---

<sup>6</sup> Büyük, Hamdi Firat, and Ahmet Erdi Öztürk. "The Role of Leadership Networks in Turkey–Balkan Relations in the AKP Era." *Turkish Policy Quarterly*, vol. 18, no. 3, 2019, pp. 119-127.

<sup>7</sup> Kubicek, Paul, Op. cit.

demokrasi. Ini sangat bermasalah dalam situasi di mana, seperti disebutkan di atas, aliansi sangat bergantung pada narasi itu untuk mengamankan legitimasi pasca-Perang Dingin di mata publiknya, dan juga untuk menjalankan bentuk kekuasaan yang halus namun efektif di lingkungannya.

Menanggapi penyimpangan Turki dari norma-norma demokrasi dan kemitraan militer dengan Rusia, NATO telah mengadopsi strategi dua arah: mengekspresikan solidaritas yang berkelanjutan dengan Turki dalam perjuangannya melawan terorisme, sementara pada saat yang sama memperingatkan Ankara tentang potensinya konsekuensi serius jika tidak mengubah perilaku rumah tangga serta menahan diri dari kerja sama militer lebih lanjut dengan Rusia.

Namun, kemampuan NATO untuk mempertahankan front persatuan vis-a-vis Turki—dan berlaku berkelanjutan tekanan dalam upaya untuk mengubah perilaku Ankara—kemungkinan akan menjadi sangat rumit perkembangan politik yang lebih luas di kawasan Euro-Atlantik. Secara khusus, aliansi ini menyaksikan kebangkitan kekuatan politik konservatif radikal di beberapa negara anggota lainnya, dan beberapa dari negara tersebut telah menyatakan dukungan untuk kebijakan dan praktik Turki yang tidak liberal.

Pergeseran Ankara yang semula begitu pro-barat. Transformasi pergeseran kebijakan Turki yang semula pro-barat merupakan bentuk juang untuk “membela” negara mereka dari apa yang mereka anggap sebagai ancaman utama bagi negara. Mengacu kepada pengendalian kapasitas kekuatan yang dimiliki Turki untuk

memberikan pengaruh atas proses internasional. Singkatnya, arah politik luar negeri Turki akan membentuk lintasan tatanan global baru dengan kemungkinan membuat negara itu akan terkena seruan yang meningkat dari pesaing global untuk memilih pihak yang memperjelas orientasi politik luar negerinya.

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan menyoroti ketegasan Turki dalam upaya pengejaran kepentingan strategisnya dengan memanfaatkan celah multipolar untuk dapat menavigasi kebijakan luar negeri yang lebih independen, mengurangi pengaruh Barat yang disadari Turki tidak begitu menaruh perhatian penuh terhadap masalah keamanan kawasannya yang rentan terkena serangan dari negara-negara konflik.

Kebangkitan Turki dalam tulisan ini dipahami kepada bentuk atau pola penyikapan Turki terhadap isu-isu internasional yang bersebrangan dengan Aliansi, melalui sorotan terhadap bentuk kebijakan luar negerinya. Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki telah menegaskan komitmennya untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri dalam urusan luar negeri. Ini mencakup tindakan-tindakan yang kadang-kadang terpisah dari pandangan atau kebijakan Barat. Kemudian dilanjut dengan peningkatan hubungan dengan aktor non-Barat.

Dalam usaha untuk memperkuat kedudukannya sebagai pemain global, Turki telah mengembangkan hubungan dengan negara-negara di luar lingkup tradisional Barat. Ini termasuk kemitraan dengan negara-negara seperti Rusia. Salah satu tujuan Turki adalah untuk mengurangi ketergantungannya pada negara-negara Barat dalam hal militer, ekonomi, dan teknologi. Ini mencakup

pengembangan kapabilitas pertahanan dalam negeri dan kerjasama dalam pengembangan teknologi alutsista.

Namun begitu, melalui pendekatan yang lebih independen, Turki juga mengakui pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan sekutu-sekutunya. Negara ini tetap berkomitmen terhadap kerjasama dalam konteks NATO dan juga berpartisipasi dalam beberapa inisiatif global. Membuat kebangkitan Turki sebagai kekuatan regional dan pergeseran kebijakan luar negerinya yang lebih tegas dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah Timur Tengah dan Eropa.

Hal ini tentu dapat memengaruhi dinamika geopolitik dan interaksi internasional. Demikian ketegasan Turki dalam mengejar kebijakan luar negerinya yang lebih independen memiliki dampak pada hubungan regional dan global, serta bagaimana ini mencerminkan perubahan dalam tatanan dunia yang lebih multipolar. Kebangkitan Turki menimbulkan gesekan dilema kepentingan dengan statusnya sebagai strategis NATO.

Yang dalam kondisi multipolar, Turki menjadi salah satu contoh dari kebangkitan negara yang muncul untuk menyeimbangkan kekuatan dalam tatanan sistem internasional. Dalam pergerakan arena internasional saat ini, ditinjau bahwa orientasi baru Turki memperluas navigasi jalur kebijakan luar negerinya dalam mencapai kepentingan, sekalipun bertentangan dengan semangat kolektif Aliansi. Mengacu pada penggunaan teori hubungan internasional dan bukti



empiris yang diharapkan mampu memberi pemahaman tentang kompleksitas transformasi politik Turki di NATO.

## 1.2. Rumusan Masalah

Multipolaritas dalam sistem internasional membuat negara-negara kian berupaya untuk saling meningkatkan kekuatan dalam mengamankan kepentingan serta keamanan negaranya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Turki yang berusaha memainkan peran seimbang dengan memilih untuk tidak berpihak secara eksklusif pada satu blok kekuatan tertentu, termasuk Aliansi NATO sekalipun.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya diketahui bahwa salah satu motivasi di balik tindakan tegas dan berani Turki adalah merujuk kepada ambisi politik untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada negara-negara lain melalui urusan kebijakan luar negeri dan keamanan. Turki ingin untuk dapat memiliki kontrol lebih besar atas keputusan-keputusan strategisnya, dengan negara itu tidak ingin terlalu bergantung pada negara-negara Barat maupun sekutu-sekutunya.

Kiranya hal ini dapat dijadikan salah satu faktor mendorong kemunculan Turki untuk diidentifikasi sebagai contoh *The Rising Power* dalam multipolaritas panggung politik global. Berdasarkan pemikiran ini, Peneliti menaruh pokok masalah dengan pertanyaan penelitian yakni **“Bagaimana peran strategis Turki di NATO mempengaruhi panggung perpolitikan global?”**

Di tengah musim semi Perang Dingin dengan kemunduran demokratis menghadapi kebangkitan otokratis, permasalahan yang dilihat saat ini Turki

berusaha untuk bisa hadir di tengah kedua kekuatan itu untuk bisa mengamankan kepentingan nasional nya dengan memanfaatkan situasi distribusi kekuatan global saat ini. Dari pokok pertanyaan penelitian tersebut penulis berupaya menemukan kajian terbaharu untuk dapat mengetahui dan menganalisis lebih lanjut bagaimana 'kenaikan' eksistensi Turki dalam percaturan politik internasional sebagai kekuatan menengah mampu memberi peran signifikan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Terdapat sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti melalui penelitian dengan judul **Kebangkitan Turki Dalam Aliansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) Dibawah Kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan (2018-2023)**. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Peneliti ialah untuk menggali dan memahami bagaimana Turki di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan (2018-2023) berperan menciptakan keseimbangan dan perdamaian dalam tatanan politik internasional.

Dalam proses penelitiannya, peneliti mengambil sikap objektif dalam meninjau upaya Turki meningkatkan peran strategis dalam menyikapi pergolakan tatanan sistem internasional. Dalam konteks ini, Peneliti akan melakukan analisis kritis dan evaluatif terhadap tindakan dan kebijakan Turki yang kerap menimbulkan kontroversial terkait sikap kolektivitasnya dalam NATO. Objektivitas dibutuhkan untuk memungkinkan peneliti mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan Turki serta dampak yang timbul akibat gesekan kepentingan internal di NATO.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh daripada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik bagi pengembangan studi Hubungan Internasional atas isu isu politik internasional kontemporer yang semakin berkembang kedepannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa program studi Hubungan Internasional dalam menyoroti masalah dinamika panggung politik internasional, khususnya temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut terkait orientasi keberpihakan Turki dimasa depan dalam tatanan sistem internasional.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Peneliti menjabarkan sistematika Penelitian penelitian ini menjadi empat bab, dalam setiap bab masing masing akan dijelaskan lebih rinci ke dalam bentuk sub bab. Penjelasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya, sehingga membentuk penelitian yang sistematis dan runtut.

Adapun pembagian pembahasan pada tulisan ini sebagai berikut:

BAB I, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II, bab ini memuat kajian pustaka serta kerangka teoritis yang relevan dengan bahasan penelitian.

BAB III, bab ini memuat penguraian mengenai metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, juga meliputi paparan akan segi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek, dimensi, dan parameter.

BAB IV, pada bab ini penulis menyajikan hasil pembahasan terkait kompleksitas peran Turki di NATO meliputi sub-sub pembahasan yang relevan seperti Kontribusi satu sama lain antara Turki dengan NATO. Kemudian pembahasan tentang kebijakan luar negeri Turki, hingga peran strategis Turki dalam gejolak geopolitik kontemporer.

BAB V, pada bab ini disajikan hasil analisis pembahasan dengan menggunakan pisau analisis yang telah penulis pilih yaitu neo-realis, collective security, dan kebijakan netralitas aktif.

BAB VI, pada bab ini berisi kesimpulan dengan penulis memaparkan benang merah daripada hasil pembahasan dan analisis kajian dari penulisan skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA, berisikan jабaran sumber-sumber yang digunakan dari olah penulisan skripsi.

